



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI
PADA MASA RESES
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
14 - 18 JULI 2023**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA 2023**

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	3
BAB II : HASIL KUNJUNGAN KERJA	7
BAB III: REKOMENDASI	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 membentuk Tim Kunjungan Kerja pada masa reses salah satunya ke Provinsi Sumatera Selatan.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses ke Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
2. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 7 tentang Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 59 Ayat (5) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menjalin komunikasi intensif antara DPR RI, khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penanggulangan bencana.
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, termasuk terhadap APBN khususnya dana dekonsentrasi.
- c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

2. Tujuan

Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program pembangunan, khususnya bidang agama, sosial,

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja pada masa reses ke Provinsi Sumatera Selatan ini dilaksanakan pada tanggal 14-18 Juli 2023.

E. Jadwal Pertemuan dan Obyek yang ditinjau

Adapun jadwal Kunjungan Kerja pada masa reses ke Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

**JADWAL ACARA
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 14-18 JULI 2023**

NO.	HARI/TANGGAL	ACARA	KETERANGAN
	Jumat, 14 Juli 2023		
1.	Pkl. 06.35 WIB	Anggota Tim Kunker sudah berkumpul di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Terminal 3, Gate 5.	Check-in 1 (satu) jam sebelum keberangkatan
	Pkl. 07.35 WIB	Take Off dari Bandara Soekarno Hatta	Dengan Pesawat GA 102
	Pkl. 08.45 WIB	Tiba Di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II menuju ruang VIP	Penjemputan oleh Protokol
	Pkl.08.45-09.30 WIB	Sarapan pagi di ruang VIP	Dikoordinasikan oleh Protokol
	Pkl.09.30 – 09.40 WIB	Perjalanan menuju Asrama Haji Embarkasi Palembang	
	Pkl. 09.40-11.40 WIB	Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan, Kakanwil Kemenag Provinsi Sumsel, Kepala Asrama Haji Embarkasi Palembang, Kadinsos Provinsi Sumsel, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala BPBD, BPKH Kepala BAZDA, Kepala BWI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dikoordinasikan oleh Protokol Turut mendampingi Eselon I/II Kemenag, Kemensos, KPPPA, BNPB, BPKH, BAZNAS, BWI

		<i>(Dilanjutkan peninjauan lapangan fasilitas Asrama Haji dan kepulauan jemaah)</i>	
	Pkl. 11.40-14.00 WIB	Jumatan dan Makan Siang	Restoran Sarinande
	Pkl. 14.30-16.00 WIB	Peninjauan Lapangan ke kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan (Kesiapsiagaan Bencana)	
	Pkl. 16.30-17.30 WIB	Peninjauan Lapangan Ke Sentra Budi Perkasa Palembang	
	Pkl. 17.30 WIB	Menuju Hotel	Hotel di Arista
	Pkl. 19.00 – 21.00 WIB	Makan malam bersama Eselon I Kementerian Sosial RI	Di restoran.....
2.	Sabtu, 15 Juli 2023		
	Pkl.06.00 WIB	Sarapan Pagi di hotel	
	Pkl.08.00 WIB	Pimpinan dan Anggota Menuju Bandar Udara Sultan Badaruddin II Palembang	Dikoordinasikan oleh Protokol
	Pkl.09.30 WIB	Take off dari Bandar Udara Sultan Badaruddin II ke Jakarta	Dengan Pesawat GA 107
	Pkl.10.45 WIB	Tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng	
3.	Minggu, 16 Juli 2023		
	Pkl.06.00 WIB	Sarapan Pagi di hotel	
	Pkl.09.00 WIB	Rapat Internal TA dan Sekretariat Komisi VIII DPR RI dengan Mitra Kerja	
	Pkl.12.00 WIB	Ishoma	
	Pkl.13.30 WIB	Pengambilan Data untuk Penyusunan Laporan Kunjungan Reses ke BPBD Kota Palembang	
	16.00 WIB	Kembali ke Hotel	
4.	Senin, 17 Juli 2023		
	Pkl.06.00 WIB	Sarapan Pagi di hotel	
	Pkl.10.00 WIB	Pengolahan Data atas Laporan Peninjauan Lapangan ke BPBD	

	Pkl.12.00 WIB	Ishoma	
	Pkl.13.30 WIB	Pengambilan Data untuk Penyusunan Laporan Kunjungan Reses ke UIN Raden Fatah Palembang	
	16.00 WIB	Kembali ke Hotel	
5.	Selasa, 18 Juli 2023		
	Pkl.06.00 WIB	Sarapan Pagi di hotel	
	Pkl.08.00 WIB	Menuju Bandar Udara Sultan Badaruddin II Palembang	Dikoordinasikan oleh Protokol
	Pkl.09.30 WIB	Take off dari Bandar Udara Sultan Badaruddin II ke Jakarta	Dengan Pesawat GA 107
	Pkl.10.45 WIB	Tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng	

BAB II

KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan, Kakanwil Kemenag Provinsi Sumsel, Kepala Asrama Haji Embarkasi Palembang, Kadinsos Provinsi Sumsel, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala BPBD, BPKH, Kepala BAZDA, Kepala BWI, dan Tokoh Agama

Sesuai dengan agenda kunjungan, tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si, melakukan pertemuan dengan pejabat OPD Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan didampingi mitra kerja yang hadir dari Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial, BNPB, dan Kementerian PPPA.

Lokasi pertemuan bertempat di Asrama Haji Embarkasi Palembang. Hadir pada acara tersebut Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, dan para tokoh masyarakat.



Pada sambutannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI menyampaikan beberapa hal. *Pertama*, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI, yaitu Anggaran, Legislasi dan Pengawasan, Komisi VIII DPR RI bermitra dengan Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kedua, terkait dengan fungsi legislasi DPR RI, Komisi VIII DPR RI saat ini tengah membahas RUU Prioritas yang telah masuk ke dalam daftar Prolegnas, yaitu RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai perbaikan kesejahteraan ibu dan anak.

Ketiga, terkait fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan setiap saat dan pada masa reses. Salah satunya adalah dalam bentuk kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan, sekaligus untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan bidang kerja Komisi VIII DPR RI, yaitu bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.

Pada masa persidangan ini, Komisi VIII DPR RI sedang membahas secara khusus mengenai peningkatan kualitas Pendidikan keagamaan dalam Panitia Kerja Pengawasan Pendidikan Keagamaan untuk melakukan pembenahan kebijakan dan peningkatan kualitas Pendidikan Keagamaan, yang meliputi perbaikan regulasi mengenai Pendidikan Keagamaan, kesetaraan anggaran bagi lembaga Pendidikan Keagamaan, peningkatan SDM di lembaga Pendidikan Keagamaan, peningkatan sarana dan prasarana lembaga Pendidikan keagamaan, aspek kelembagaan, dan bantuan bagi lembaga pendidikan keagamaan.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga telah melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan di embarkasi-embarkasi haji pada saat pemberangkatan jemaah. Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana DPR RI diberikan amanat sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan ibadah haji selain melakukan pembahasan mengenai besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tim pengawas haji DPR RI menyoroti berbagai temuan mengenai kurang maksimalnya pelayanan di Armuzna, terutama kendala bus di Muzdalifah, masalah PPIH di Arab Saudi, pelayanan konsumsi, dan masalah tenda di Mina yang menyebabkan para jemaah tidak tertampung di tenda-tenda yang telah dibayar dengan biaya tidak sedikit. Pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah lansia pun masih kurang maksimal.

Jumlah jemaah haji yang meninggal sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 berjumlah 614 orang, jumlah yang sangat banyak. Pada tahun 2019, di mana jumlah jemaahnya sama namun tidak mencapai 400 orang. Hal tersebut merupakan hal penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya.

Dalam kunjungan kerja, Ace Hasan Syadzily menambahkan, bahwa kegiatan reses Komisi VIII DPR RI didampingi oleh rekan-rekan mitra kerja Komisi, yaitu para pejabat dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, Kementerian PPPA, BAZNAS, dan BPKH. Hal ini bertujuan agar lembaga-lembaga tersebut terlibat secara aktif. Kehadiran para mitra kerja dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat respon dan pemberian solusi terhadap masalah-masalah serta aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan kerja.

Terkait dengan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatera Selatan, tim kunjungan kerja bermaksud untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemangku kepentingan di bidang agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pertanyaan tertulis yang terkait dengan bidang-bidang tersebut telah disampaikan oleh Sekretariat dan harapannya pada pertemuan hari ini membahas secara lebih mendalam mengenai berbagai permasalahan strategis yang perlu ditindaklanjuti. Masukan dan aspirasi tersebut sangat berguna sebagai bahan kebijakan Komisi VIII DPR RI dalam melakukan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran pada saat rapat-rapat dengan mitra Komisi VIII DPR RI.

Pada pertemuan tersebut disampaikan berbagai jawaban dari pertanyaan Komisi VIII DPR RI yang telah diajukan secara tertulis oleh Komisi VIII DPR RI terkait permasalahan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

1. Permasalahan Agama

- a. Keberangkatan jemaah haji telah dilakukan dan sebagian kloter jemaah haji telah berangsur datang ke embarkasi Palembang.
- b. Asrama haji masih embarkasi Palembang masih berstatus milik Provinsi Sumatera Selatan dan dikelola oleh Badan tersendiri serta dipihak ketigakan. Kondisinya meskipun telah cukup lengkap fasilitasnya tetapi masih membutuhkan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani jemaah haji dari Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Jumlah KUA di Sumatera Selatan berjumlah 232 KUA, dengan status tanah milik sendiri dan bersertifikat sebanyak 123 KUA, 31 KUA berdiri di lahan wakaf, 30 KUA berdiri di atas tanah hibah, 34 KUA berdiri di tanah

Pemerintah Daerah dengan status pinjam pakai, dan 14 KUA belum memiliki lahan sama sekali. Mengharapkan bantuan untuk pengadaan lahan bagi KUA yang belum memiliki lahan agar pelayanan bidang agama dapat lebih maksimal.

- d. Tingkat kerukunan umat beragama di Provinsi Sumatera Selatan tergolong sangat rukun, meskipun terdapat insiden-insiden kecil tetapi dapat diselesaikan berkat fungsi FKUB yang solid di provinsi Sumatera Selatan.
- e. Pendidikan keagamaan di Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta, namun persentasenya masih lebih besar yang diselenggarakan oleh swasta. Perlu upaya dan kebijakan dalam penegerian sekolah-sekolah swasta yang representatif sesuai dengan peraturan perundangan agar kualitas pendidikan lebih meningkat.
- f. Dari MUI dan tokoh agama Sumatera Selatan menyampaikan aspirasinya agar biaya haji di tahun mendatang tidak terlalu tinggi dan dosampaikan kepada masyarakat jauh-jauh hari agar jemaah dapat menyiapkan pelunasannya, sehingga tidak terjadi lagi jemaah membatalkan keberangkatannya karena belum siap dana pelunasannya.

2. Permasalahan Sosial.

- a. Masalah sosial di Sumatera Selatan di tahun 2023 di antaranya terdapat masalah pemulangan mahasiswa Sudan yang terlibat kerusuhan.
- b. Pemerintah Sumatera Selatan mengalokasikan bantuan untuk supras panti.
- c. Permasalahan utama penyaluran bantuan, seperti KIP, KIS, KUBE, dan lain-lain terkendala oleh masalah pendataan. Terdapat perbedaan data antara data orang miskin dari Dukcapil dengan data Kemensos.
- d. Tali asih untuk TKSK dirasakan sangat kecil tidak sebanding dengan tugas yang diemban oleh TKSK. Untuk itu, diminta bantuan Komisi VIII DPR RI agar alokasi anggaran Kesejahteraan TKSK di daerah dapat dibiayai oleh APBN atau adanya pengaturan yang pasti mengenai pemberian tali asih bagi TKSK oleh Pemerintah Daerah.

2. Permasalahan Bencana

- a. BPBD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa sebagaimana siklus penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan juga telah mengikuti siklus sebagaimana siklus tersebut.

- b. Untuk pra bencana berupa kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan mitigasi seperti apel kesiapsiagaan personil/peralatan dan gladi lapangan penanggulangan bencana.
- c. Untuk saat bencana berupa kegiatan penyelamatan dan pencaharian, kaji cepat bencana serta penyiapan kebutuhan tanggap darurat bencana berupa logistik dan peralatan.
- d. Untuk pasca bencana khususnya pembangunan fisik seperti pembuatan talud, dam, tembok penahan sungai atau jalan sebagian besar memang masih mendapat bantuan dana hibah dari BNPB, namun juga sudah dialokasikan dana untuk pendampingan kegiatan dimaksud.
- e. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk saat ini cukup komprehensif dan akomodatif sebagai dasar atau landasan hukum untuk pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Berdasarkan kondisi geografis Provinsi Sumatera Selatan yang dipengaruhi oleh musim, maka ancaman bencana yang ada di Provinsi Sumatera Selatan berupa Banjir Bandang, Tanah Longsor, Banjir Genangan, Angin Puting Beliung Kebakaran Hutan dan Lahan serta kebakaran rumah dan ancama letusan gunung api (Gunung Api Dempo) yang merupakan gunung api aktif yang sekarang berada pada level II (Waspada).

3. Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Penurunan stunting 18.6 persen dari 26 persen, turun 8 persen. Tertinggi penurunannya secara nasional. Di mana di tingkat nasional angka stunting masih berada di angka 21.6 persen.
- b. DAK Non Fisik dari Kementerian PPPA diberikan kepada UPTD, namun belum semuanya mendapatkan DAK tersebut.
- c. Aspirasi dari Dinas PPPA Sumatera Selatan agar ada dana DAK Fisik khususnya untuk pengadaan mobil perlindungan guna menjangkau ke daerah-daerah dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Meminta untuk ditambah anggaran mengenai sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pertemuan dan Peninjauan Lapangan ke BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI melanjutkan pertemuan dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan di kantor BPBD.



Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanggulangan bencana di Provinsi Sumsel, di antaranya:

- a. Kejadian bencana di Sumatera Selatan Tahun 2023 sebanyak 55 kali kejadian bencana berupa : kebakaran pemukiman 14 kali, banjir 19 kali, puting beliung 13 kali, tanah longsor 3 kali, banjir bandang 5 kali, bencana lainnya 1 kali.
- b. BPBD menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk penanggulangan bencana yaitu penyiapan personil dengan spesifikasi untuk operator kendaraan lapangan, tangki air, dapur umum, perahu karet, tenda penampungan dan mesin pompa pemadaman.
- c. BPBD Sumatera Selatan juga menyiapkan peraturan dan logistik penyelamatan seperti satgas evakuasi dan penyelamatan, satgas dapur umum lapangan serta satgas pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

- d. Sarana parasarana yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Sumsel di antaranya berupa kendaraan operasional, dapur umum, tangki air, perahu karet, mesin genset, mesin pompa pemadaman dan tenda pengungsi.
- e. Untuk sistem peringatan dini, seperti kebakaran hutan dan lahan ini sudah diakomodasi melalui aplikasi Songket sebagai suatu sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Untuk sistem *early warning* ancaman bencana yang lain seperti ancaman bencana gempa bumi, letusan gunung api, cuaca ekstrim, tinggi muka air gambut leadingnya masih ada pada Lembaga yang menaungi namun informasi tetap kita terima dan selalu dikoordinasikan.
- g. Karena kejadian bencana terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota agar Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat diperkuat peran dan fungsi dalam penanggulangan bencana, karena merupakan ujung tombak untuk penanggulangan kejadian bencana secara cepat dan tepat.
- h. Aspirasi dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk peningkatan kualitas penanggulangan bencana adalah:
 - 1) Perlunya revitalisasi peralatan penanggulangan bencana seperti kendaraan operasional, perahu karet, tenda, valbet dan mesin pompa pemadam kebakaran hutan dan lahan.
 - 2) Penyediaan Logistik yang Cukup untuk Korban Bencana
 - 3) Rekrutmen Tenaga Penanggulangan Bencana sampai tingkat Kabupaten
 - 4) Alokasi anggaran yang memadai termasuk Dana Siap Pakai (DSP).

Pada pertemuan tersebut, disampaikan bantuan operasional dari BNPB kepada BPBD Provinsi Sumatera Selatan melalui Komisi VIII DPR RI berupa 6 helikopter *Water Bombing* guna mengantisipasi dan menanggulangi bencana kebakaran hutan yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, diserahkan juga operasional untuk 2 helikopter patroli serta bantuan logistik untuk penanggulangan bencana.



Pertemuan dengan BPBD dilanjutkan dengan melakukan peninjauan logistik BPBD untuk melihat kesiapan sapsras dan personil yang dimiliki oleh BPBD Kota Balikpapan.

Pada kesempatan itu diperlihatkan seluruh sapsras dan personil yang dimiliki untuk kesiapsiagaan bencana di Sumatera Selatan dalam menanggulangi bencana.



BPBD Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki sapras dan gedung yang cukup memadai dalam kegiatannya dengan lapangan parkir luas sehingga dapat digunakan sebagai shelter di saat bencana dan terdapat juga fasilitas pemulihan trauma pasca bencana yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, personil BPBD selalu diikuti dalam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam penanggulangan bencana.

Pertemuan dan Pemberian Bantuan di Sentra Budi Perkasa Palembang

Rombongan tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI melanjutkan agenda kunjungan dengan melakukan pertemuan bersama Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang didampingi pejabat Eselon II Kementerian Sosial RI, yaitu Plt. Sekretaris Dirjen Linjamsos.



Pada pertemuan tersebut, Ketua Tim Kunjungan, Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI yang di antaranya bermitra kerja dengan Kementerian Sosial RI saat ini telah melakukan pembahasan APBN Tahun 2023 dan sedang membahas RAPBN Tahun 2024. Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp78.256.327.121.000,- (tujuh puluh delapan triliun dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta serratus dua puluh satu ribu rupiah).

Program utama Kementerian Sosial RI di tahun 2023 adalah belanja Bansos PKH dengan anggaran sebesar Rp28.7 Triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan program Belanja Bansos Sembako dengan anggaran sebesar Rp.45.1 Triliun untuk 18,8 juta KPM. Target penerima manfaat kedua program tersebut sama dengan target pada tahun 2022.

Selain pada bantuan sosial yang telah diprogramkan oleh Kementerian Sosial, Komisi VIII DPR RI juga mendukung adanya tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial RI untuk dialokasikan pada program Asistensi Rehabilitasi Sosial atau ATENSI bagi anak yatim piatu dan program pemberian makan bagi Lansia dan Disabilitas sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap para anak yatim piatu, lansia, dan disabilitas. Adapun di bidang legislasi, Komisi VIII DPR RI saat ini sedang melakukan pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang juga terkait dengan bidang sosial sebagai upaya memperbaiki kebijakan dalam aspek hukum bagi peningkatan kesejahteraan ibu dan anak.

Secara khusus mengenai tujuan utama Kunjungan Kerja ke Sentra Budi Perkasa Palembang, Ketua Tim Kunjungan Kerja menyampaikan, yaitu untuk menyerap aspirasi terutama dalam peningkatan peran sentra sosial di daerah. Hal ini mengingat berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial bahwa Sentra Budi Perkasa adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, yang tugas utamanya adalah melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial. Selain itu, tugas lain dari UPT Sentra adalah menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

Saat ini Kementerian Sosial memiliki 4 UPT Sentra Terpadu dan 27 UPT Sentra yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk satu UPT Sentra di Sumatera Selatan, yaitu UPT Budi Perkasa Palembang.

Sesuai dengan Permensos Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, atau yang disebut program ATENSI, yaitu layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Sasaran Program Rehabilitasi Sosial

diperuntukkan untuk 5 (lima) kluster penerima manfaat, meliputi: (1) anak; (2) penyandang disabilitas; (3) tuna sosial dan korban perdagangan orang; (4) korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan (5) lanjut usia.

Adapun tujuan Program ATENSI adalah untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan mengatasi masalah dalam kehidupan.

Atas dasar pemikiran tersebut, dalam kunjungan kerja hari ini, Komisi VIII DPR RI bermaksud mendalami beberapa isu aktual, yaitu:

1. Mengenai data terkini profil Sentra Budi Perkasa Palembang, mencakup: dasar hukum pendirian, struktur organisasi, wilayah kerja, SDM, dan sarana prasarana yang dimiliki.
2. Dukungan anggaran Sentra Budi Perkasa Palembang tahun anggaran 2023 dan perbandingannya dengan tahun 2022, serta analisa anggaran ideal untuk meningkatkan peran UPT Sentra Budi Perkasa Palembang.
3. Rincian kegiatan asistensi rehabilitasi sosial yang dilakukan Sentra Budi Perkasa Palembang serta jumlah penerima manfaat yang telah memperoleh asistensi rehabilitasi sosial selama dua tahun terakhir.
4. Kendala yang dihadapi dan usulan solusi atas masalah tersebut yang dapat ditindaklanjuti oleh Komisi VIII DPR RI yang akan disampaikan kepada Kementerian Sosial RI dan pihak yang berwenang.

Pejabat Sentra Budi Perkasa yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Dirjen Linjamsos, menyampaikan apresiasinya kepada tim kunjungan kerja yang menyempatkan waktu mengunjungi Sentra di Palembang, sebagai salah satu UPT Kementerian Sosial yang bertugas memberikan asistensi kepada para penerima manfaat.

Sentra Budi Perkasa Palembang memerlukan dukungan dari Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial RI yaitu penambahan anggaran untuk operasional sentra, terutama untuk pemeliharaan gedung dan penambahan alokasi program atensi bagi Provinsi Sumatera Selatan.



Pada pertemuan di Sentra Budi Perkasa Palembang diberikan bantuan berupa program PKH dan Atensi kepada KPM di Sentra Budi Perkasa dengan total bantuan sebesar Rp209.926.281.315.

Pertemuan dengan UIN Radeh Fatah Palembang

Tim pendukung kunjungan kerja melakukan kunjungan dan melakukan pertemuan dan pihak rektorat UIN Raden Fatah Palembang untuk menggali permasalahan penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam di Sumatera Selatan.

Dari hasil pertemuan, diperoleh informasi mengenai kinerja UIN Raden Fatah bahwa selama triwulan I 2023 UIN Raden Fatah Palembang sudah berhasil mencapai 17,89% kinerja IKU Universitas, 20.95% untuk capaian Rencana Strategis, 22.20% untuk capaian perjanjian kerja dengan Kementerian Agama dan 2.19% untuk capaian perjanjian kerja dengan Kementerian Keuangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023 pada aplikasi E-kinerja, diketahui capaian IKU UIN Raden Fatah Triwulan Tahun 2023 sebesar 17,89%, IKU Universitas terdiri dari 4 sumber yaitu:

- 1) Kontrak Kinerja Kementerian keuangan, dengan capaian sebesar 2,19%, hal ini dikarenakan hanya terdapat 2 target yang harus dicapai pada triwulan I Tahun 2023 dari 18 IKU Kementerian Keuangan pada Tahun 2023;

- 2) Renstra, dengan capaian sebesar 20,95%, capaian ini ditopang oleh “Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding/buku nasional terakreditasi” yang cukup tinggi pada Triwulan I Tahun 2023 yaitu 27 publikasi dari 100 target publikasi nasional terakreditasi;
- 3) Akreditasi, dengan capaian sebesar 25,65%, capaian ini ditopang oleh “Persentase lulusan S1 yang tepat waktu” dengan target 57% dan capaian pada Triwulan I Tahun 2023 sudah mencapai 59%;
- 4) Perjanjian Kinerja Kementerian Agama, dengan capaian sebesar 22,20%, capaian ini ditopang oleh Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa S1 dan Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa S2 yang telah melebihi target“ .

BAB III

REKOMENDASI

Dari hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, berikut ini rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan rapat dengan para mitra kerja di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

A. Bidang Keagamaan

1. Perlu disampaikan pada saat RDP dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI mengenai permasalahan kebutuhan anggaran untuk pengadaan lahan 13 KUA yang belum memiliki lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, mengenai permasalahan penyuluh agama. Terdapat ketimpangan antara jumlah penyuluh agama dengan kegiatan penyuluhan keagamaan yang sangat dibutuhkan masyarakat, termasuk untuk kegiatan bimbingan pranikah dan layanan nikah.
2. Perlu disampaikan pada saat RDP dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengenai aspirasi dari para tokoh agama di Sumatera Selatan mengenai pentingnya sosialisasi kebijakan biaya haji dan agar pelunasan biaya haji tidak terlalu dekat dengan tanggal keberangkatan.

Bidang Sosial

1. Komisi VIII DPR RI perlu menyampaikan kepada Menteri Sosial RI mengenai aspirasi dari Sentra Budi Perkasa Palembang mengenai peningkatan program atensi dan dukungan peningkatan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana di sentra tersebut.
2. Perlu disampaikan pada Rapat Kerja dengan Menteri Sosial mengenai kebijakan pemberian Tali Asih untuk TKSK yang tidak sebanding dengan tugas TKSK sebagai ujung tombak pelayanan sosial terhadap masyarakat.

Bidang Bencana

1. Komisi VIII DPR RI perlu menyampaikan kepada Kepala BNPB mengenai pemberian alokasi DSP dan peningkatan sarana prasarana serta logistik guna pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di Sumatera Selatan.
2. Komisi VIII DPR RI perlu menyampaikan kepada Kepala BNPB agar rekrutmen tenaga Penanggulangan Bencana juga dilakukan sampai tingkat Kabupaten.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Perlu disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengenai aspirasi Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan agar dialokasikan dana DAK Fisik, khususnya untuk pengadaan mobil perlindungan perempuan dan anak guna menjangkau daerah-daerah yang terpencil.
2. Komisi VIII DPR RI perlu menegaskan mengenai pentingnya peningkatan program pemberdayaan dan perlindungan anak kepada Menteri PPPA, mengingat masih banyaknya kejahatan terhadap anak di daerah.